

Global Performance Indicator dan pengaruhnya terhadap Reformasi Regulasi

Dr. Aria Suyudi, SH., LLM
Pengajar STHI Jentera
2022

Mengenai Presentasi ini

- Bagaimana Indeks Ease of Doing Business telah mempengaruhi kebijakan Ekonomi dan Reformasi Hukum
- Situasi Terkini dari Indeks Ease of Doing Business
- Masa depan Survei Indeks Ease of Doing Business

Pengantar

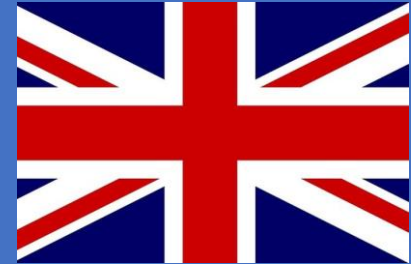
Mengapa EoDB

- EoDB adalah satu Indeks yang secara ilmiah memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai Global Performance Indicator GPI (Kelly & Simmons, 2019)
- Karakteristik GPI :
 - a. harus tersedia secara publik dan mudah diperoleh
 - b. diterbitkan rutin pada jadual yang dapat diprediksi;
 - c. purposif, secara eksplisit normatif berfokus kepada kebijakan;
 - d. dilaksanakan untuk mempengaruhi keluaran di tingkat pemerintah; dan
 - e. bersifat komparatif terhadap kinerja berbagai negara dalam suatu kawasan atau lebih luas:
- EoDB Merupakan indeks yang menggunakan pemeringkatannya menggunakan metode obyektif empiris terhadap kerangka regulasi.
- Cakupan ranking EoDB paling luas, meliputi 190 negara.
- Merupakan salah satu GPI paling tua, yang diterbitkan pertama kali tahun 2003.
- Diselenggarakan oleh Lembaga multilateral (World Bank Group)
- Indeks ini sangat penting, dan merupakan salah satu publikasi utama (*flagship publication*) WBG
- Indeks EoDB dan diklaim WBG sebagai survei instrumental yang mempengaruhi kebijakan banyak negara dalam melakukan agenda pembaruan ekonominya. Tercatat 70 negara membentuk komite pembaruan yang dikaitkan khusus dengan peningkatan peringkat EoDB.
- Pengakuan politis yang luas dari banyak negara besar, termasuk dari beberapa pemimpin negara G20

Indeks EoDB Sebagai Global Performance Indicator (GPI) yang Mempengaruhi Reformasi Regulasi di Berbagai Negara



Inggris Raya menargetkan untuk mencapai peringkat pertama di wilayah Eropa dan 5 besar dunia pada survei EoDB pada tahun 2020 dan memimpin Eropa untuk menarik investor asing
David Cameron Perdana Menteri Inggris 2015



Menetapkan target bagi India untuk masuk ke 50 besar survei EoDB, Pada tahun 2018 di World Economic Forum, PM Modi lebih lanjut menyatakan bahwa India telah melakukan perubahan terhadap tidak kurang 1,200 peraturan perundang-undangan.
Narendra Modi, Perdana Menteri India 2013



Rusia harus naik ke peringkat 20 besar,
Cat: saat itu Rusia berada di peringkat 35
Vladimir Putin, Presiden Rusia, 2012



Peta Regulasi & Kebijakan Kemudahan Berusaha Indonesia

Kebijakan & Arahannya Umum Perencanaan Nasional

Perpres 81 /2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Target Peringkat EoDB RI 75 pada tahun 2014

Perpres 2 / 2015 RPJMN (2015-2019)

- Menekan Prosedur SAB menjadi 7 Hari dan 5 Prosedur pada 2019.
- Reformasi Sistem Hukum Perdata, termasuk diantaranya *small claim court*.

Perpres 18/2020 RPJMN (2019-2024)

Peningkatan Peringkat EoDB pada 2024
 Starting A Business : Menuju 40
 Getting Credit : 20
 Enforcing Contract : 70
 Resolving Insolvency : 20

Inpres 12 /2015 Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, Dan Kepastian Usaha

Paket Kebijakan Ekonomi XII yang memuat agenda reformasi kerangka hukum EoDB pada 2017
 Menunjuk Kemenko EKON sebagai koordinator.

Inpres 7 /2019 Percepatan Kemudahan Berusaha

Menunjuk BKPM sebagai koordinator perbaikan Peringkat EoDB.

Visi Indonesia 2045

Peringkat 20 EoDB pada tahun 2045

Rencana Kerja Pemerintah 2015-2020

Perpres 29/2011 RKP 2012

Peringkat 75 pada 2014

Perpres 54/2012 RKP 2013

Peringkat 75 pada 2014
 SAB : 20 hari
 Construction Permit : 137 hari
 Getting Electricity : 90
 Registering Property : 20

Perpres 43/2015 RKP 2015

- Revisi UU No. 40/2007
- Rancangan Perma Small Claim Court

Perpres 60/2015 RKP 2016

Mencapai peringkat 108 pada 2016

Perpres 45/2016 RKP 2017

Target Komprehensif bagi setiap indikator

Perpres 79/2017 RKP 2018

Menuju peringkat 40 pada 2017

Perpres 72/2018 RKP 2019

Menuju peringkat 40 pada 2017

Perpres 61/2019 RKP 2020

- Peringkat EoDB menuju 40
- Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha

Penghentian Penerbitan Indeks EoDB

- Setelah penerbitan Indeks EoDB 2020 mengalami penundaan, maka World Bank Group pada 16 September 2021 mengumumkan penghentian penerbitan Indeks EoDB setelah 17 tahun berjalan.

*After reviewing all the information available to date on Doing Business, including the findings of past reviews, audits, and the [report](#) the Bank released today on behalf of the Board of Executive Directors, World Bank Group management has taken the decision **to discontinue the Doing Business report**. The World Bank Group remains firmly committed to advancing the role of the private sector in development and providing support to governments to design the regulatory environment that supports this. Going forward, we will be **working on a new approach to assessing the business and investment climate**. We are deeply grateful*

- Perkembangan terkini adalah World Bank berencana untuk meluncurkan indeks baru bertajuk Business Enabling Environment Index (BEE)

... Respon Beberapa Negara Terhadap Penghentian Indeks EoDB

NIGERIA | #131 (EODB 2020)



- Nigeria menyatakan akan **tetap berkomitmen melakukan reformasi** meskipun laporan EODB dihentikan, meskipun belum memutuskan langkah berikutnya terkait acuan perbaikan
- "... Kami akan tetap **berkomitmen pada agenda kami untuk meningkatkan iklim bisnis Nigeria dengan menyeluruh**," – Jumoke Oduwole, Sekretaris Presidential Enabling Business Environment Council (PEBEC)
- PEBEC, yang dibentuk pada tahun 2016 telah **menyusun indikator dan program mandiri terkait kemudahan berusaha**, yang telah menghasilkan ~160 reformasi hambatan birokrasi

PAKISTAN | #108 (EODB 2020)



- Pakistan telah merespon penghentian laporan EODB, **namun belum menyampaikan tindak lanjut terkait Rencana Aksi Reformasi pasca-penghentian EODB**
- Pakistan belum lama ini **menetapkan Rencana Aksi Reformasi melalui kolaborasi dengan Bank Dunia** dengan berlandaskan Sistem Pemeringkatan EODB

FILIPINA | #95 (EODB 2020)



- Pasca-penghentian laporan EODB, **Filipina merencanakan untuk melokalisasikan Sistem Pemeringkatan Kemudahan Berusaha** tersebut untuk tetap menumbuhkan sisi kompetitif untuk pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota
- Sebelumnya, Filipina telah **memberlakukan paying hukum terkait EODB & pelayanan pemerintahan yang efisien** pada tahun 2018 yang menjadi basis sebuah divisi khusus di Kantor Presiden Filipina

GHANA | #118 (EODB 2020)

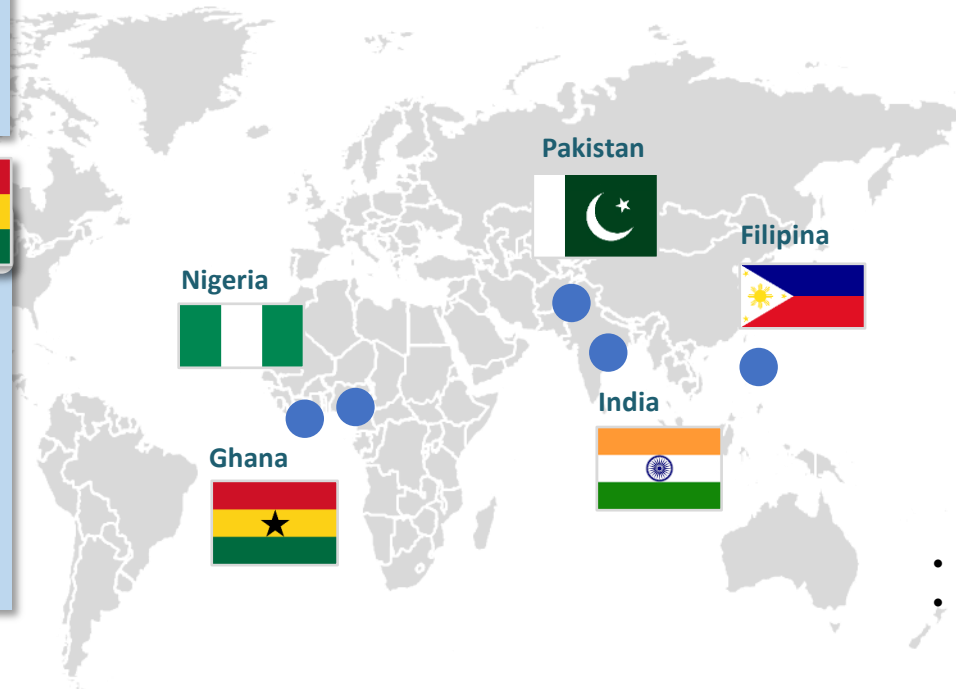


- Ghana menyatakan akan **tetap meneruskan reformasi kebijakan** yang telah dilaksanakan terkait EODB, namun juga belum memutuskan langkah berikutnya terkait acuan perbaikan
- "... kami akan terus melanjutkan reformasi (yang telah kami rencanakan) ... karena reformasi tersebut **dibutuhkan untuk membuat ekonomi Ghana meningkat**," – Felix E. Addo, Konsultan untuk Kementerian Perdagangan

INDIA | #63 (EODB 2020)



- India telah menyatakan bahwa penghentian laporan EODB **tidak menghentikan komitmen mereka untuk meningkatkan Kemudahan Berusaha di India**
- Di sisi lain, sejak 2015, India sudah dengan ketat mengikuti praktik terbaik dalam EODB dalam menyusun rencana aksi reformasi bisnis (**Business Reforms Action Plan/ BRAP**) secara tahunan yang diterapkan kepada pemerintah daerah (*state*)



- 190 Negara** yang disurvei
- Indeks EoDB dan diklaim WBG sebagai survei instrumental yang **mempengaruhi kebijakan** banyak negara dalam melakukan agenda pembaruan ekonominya.
- Tercatat **70 negara** membentuk **komite pembaruan yang dikaitkan khusus dengan peningkatan peringkat EoDB**.



Masa Depan Global Performance Index

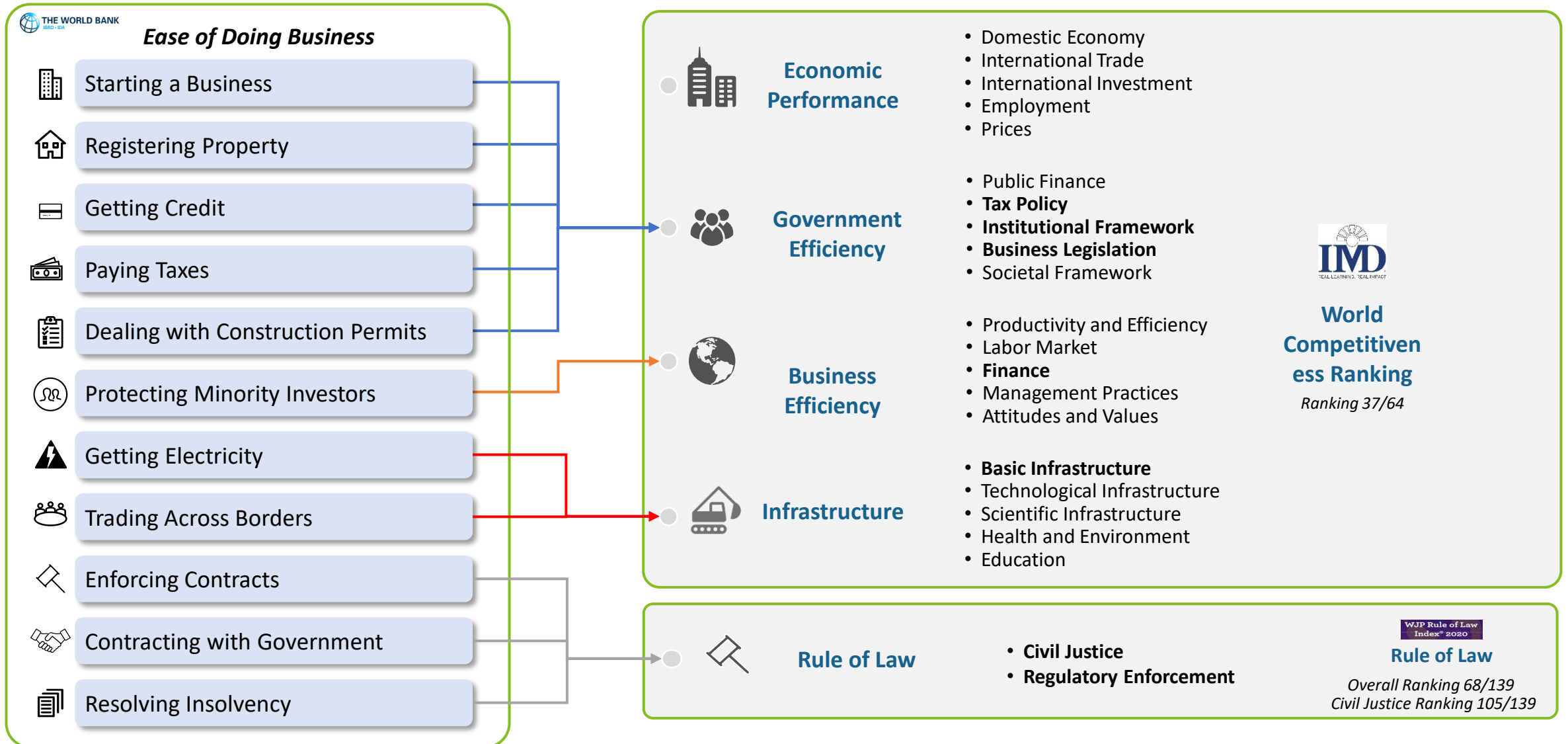
IMD World Competitiveness Index (IMD) yang dipadukan dengan Rule of Law Index (RoLI) memiliki relevansi terbaik di antara indeks kompetitif yang terkait



6 Alasan penggunaan IMD dan RoLI berdasarkan kualitas index

- 1 Orientasi pada Aksi**
Nilai-nilai dapat ditingkatkan secara langsung dengan reformasi tertentu
- 2 Legitimasi Penerbit**
Legitimasi penerbit sebagai institusi penelitian dan riset terpercaya
- 3 Sejarah dan Pemanfaatan**
Indeks telah dirilis lebih dari 10 tahun
- 4 Lingkup Ekonomi/Negara yang Dikaji**
Kajian/pemeringkatan dilakukan pada lebih dari 50 negara
- 5 Transparansi atas Metodologi**
Metodologi pengumpulan data/ tools/ instrumen & hasil dipublikasikan
- 6 Pola Jadwal Publikasi**
Publikasi indeks dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sekali

Seluruh topik yang dinilai dalam EODB dapat terpetakan ke aspek penilaian dalam indeks World Competitiveness Ranking IMD dan Rule of Law



EODB INDEX INDICATOR 2020

STARTING A BUSINESS	DEALING WITH CONSTRUCTION PERMITS	GETTING ELECTRICITY	REGISTERING PROPERTY	GETTING CREDIT	PROTECTING MINORITY INVESTORS	PAYING TAXES	TRADING ACROSS BORDERS	ENFORCING CONTRACT	RESOLVING INSOLVENCY
140	110	33	106	48	37	81	116	139	38



BEE INDEX INDICATOR (PROPOSED)

OPENING A BUSINESS <i>MEMBUKA USAHA</i>		OPERATING A BUSINESS <i>MENGELOLA SUATU USAHA</i>							CLOSING A BUSINESS <i>MENUTUP USAHA</i>
Business Entry <i>Memulai Usaha</i>	Business Location <i>Lokasi Usaha</i>	Utility Connections <i>Jaringan Utilitas</i>	Labor <i>Tenaga Kerja</i>	Financial Services <i>Layanan Keuangan</i>	International Trade <i>Perdagangan Internasional</i>	Taxation <i>Perpajakan</i>	Dispute Resolution <i>Penyelesaian Sengketa</i>	Market Competition <i>Kompetisi Pasar</i>	Business Insolvency <i>Insolvensi Usaha</i>

Konsep Dasar Index Business Enabling Enviroment (BEE Index)

KERANGKA HUKUM

Mempertimbangkan Kualitas Regulasi (transparansi, kejelasan, prediktabilitas + beban regulasi)

Contoh : Aturan untuk Memulai Usaha

PELAYANAN PUBLIK

Mempertimbangkan pengaturan institusional, infrastruktur, dan program yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang penting bagi berfungsinya pasar

Contoh : Institusi untuk pelaksanaan kontrak komersial

EFISIENSI

Bagaimana tujuan dari setiap topik dicapai dalam prakteknya, sebagaimana dilihat melalui survey tingkat perusahaan dan/atau konsultasi dengan ahli
Contoh : Waktu dan Biaya untuk memperoleh koneksi internet

Business entry

- a. the quality of regulations for business entry (regulatory framework pillar),
- b. the digital services and transparency of information for business start-ups (public services pillar), and
- c. the efficiency of the process to open a business

Labor

- a. the quality of labor regulations (regulatory pillar);
- b. the adequacy of public services for the labor market (public services pillar); and
- c. the ease of employing labor which assesses how the two pillars

Taxation

- (a) the quality of tax regulations (regulatory framework pillar),
- (b) the services provided by the tax administration (public services pillar), and
- (c) the tax burden and efficiency of tax systems.

Business location

- a. the quality of regulations for immovable property lease, property ownership and urban planning (regulatory framework pillar),
- b. the quality of public services and transparency of information (public services pillar), and
- c. the efficiency of key services in getting a business location.

Financial services

- a. the **quality of regulations for secured transactions, e-payments, and green financing** (regulatory pillar);
- b. the quality of **credit reporting framework**, including scope and availability of credit information distributed through credit bureaus and registries, as well as availability and functionality of a collateral registry (public services pillar); and
- c. the ease of receiving financial services.

Dispute resolution

- (a) the quality of regulations for commercial dispute resolution (regulatory pillar),
- (b) the adequacy of public services in commercial litigation (public services pillar);
- (c) the ease of resolving a commercial dispute

Business Insolvency

- (a) Quality of regulations for insolvency proceedings
- (b) Quality of institutional and operational infrastructure for insolvency processes
- (c) Ease to resolve an insolvency judicial proceeding

Utility connections

- a. quality of utility regulations (regulatory framework pillar),
- b. utility performance and transparency of utility services (public services pillar), and
- c. efficiency of implementation of utility regulations and services.

International trade

- a. the quality of regulations for international trade in goods, e-commerce and environmentally sustainable trade (regulatory framework pillar),
- b. the quality of public services for the facilitation of international trade in goods (public services pillar) and
- c. the efficiency of importing goods, exporting goods, and engaging in e-commerce.

Market Competition

- (a) the quality of regulations that promote market competition (regulatory pillar),
- (b) the adequacy of public services promoting competition (public services pillar)
- (c) the efficiency in the implementation of key services promoting market competition

Layanan Keuangan

a. kualitas peraturan terkait **transaksi berjaminan, e-payments, dan green financing** (pilar regulasi);

Transaksi Berjaminan

1. Keberadaan regulasi dengan Pendekatan **terintegrasi dan fungsional** sesuai dengan praktek terbaik UNCITRAL Pedoman Legislatif tentang Transaksi Berjaminan dan standar Internasional lainnya.
2. Eksekusi hak jaminan benda bergerak
3. Peluang untuk menyelesaikan eksekusi **di luar pengadilan** untuk baik melakukan penarikan dan menjual benda jaminan melalui lelang public dan/atau privat.

E-Payments

Kerangka hukkum e-payments yang mempromosikan keuangan inklusif dengan prinsip2 sebagai berikut

1. **Manajemen risiko** yang Tangguh (termasuk melalui pengawasan/ pemantauan terhadap penyedia layanan);
2. **Perlindungan dana pelanggan** (termasuk regulasi tentang kesalahan dan transaksi curang);
3. Transparansi biaya, syarat dan kondisi;
4. Ketersediaan **jalur untuk keberatan dan mekanisme penyelesaian sengketa**
5. **Aksesibilitas yang** luas tanpa menghambat integritas system keuangan (termasuk syarat interoperabilitas dan syarat non eksklusif)
6. **Promosi dan kompetisi** diantara penyedia layanan, instrument, produk, model bisnis dan jalur.

Green Bonds

1. Aturan keuangan berkelanjutan, sesuai dengan **kerangka yang dikembangkan oleh UNEP dan Green Finance Platform**;
2. **Praktek terbaik** terkait dengan penerbitan green bonds, seperti yang diatur pada the Sustainability Bond Guidelines yang diterbitkan oleh the International Capital Markets Association;
3. **Signifikansi penerbitan green bonds** dalam pasar obligasi; dan
4. Persyaratan **transparansi, kualifikasi profesional** dan instrument tersedia untuk menghindari benturan kepentingan pada perusahaan yang bertindak sebagai peninjau eksternal green bonds.

b. Kualitas kerangka pelaporan kredit, termasuk skope dan ketersediaan informasi kredit yang didistribusikan melalui Biro Kredit dan Kantor Pendaftara, serta ketersediaan dan fungsionalitas register jaminan (pilar pelayanan publik);

1. Operasionalisasi Biro Kredit dan Kantor Pendaftaran–
2. Operasionalisasi Register Jaminan –

c. Kemudahan Menerima Pelayanan Keuangan

1. Memastikan e-payment –mengukur **waktu biaya yang** diperlukan untuk **melakukan pembayaran elektronik** melalui setiap dari empat metode sbb : internet banking, mobile banking, e- money, dan payment cards.
2. Memperoleh **Pinjaman**– Komponen ini mengukur **biaya dan waktu** bagi suatu perusahaan untuk memperoleh pinjaman

Penyelesaian Sengketa

(a) Kualitas regulasi untuk penyelesaian sengketa (pilar regulasi)

- 1) *Proses litigasi di Pengadilan*– Kualitas regulasi terkait dengan pelaksanaan litigasi di peradilan
- 2) *Mekanisme Alternative dispute resolution*– Kualitas regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa alternatif (arbitrase dan mediasi)

(b) Kelayakan layanan publik dalam litigasi komersial (pilar layanan publik);

- 1) *Kerangka Institusional*
- 2) *Otomasi Pengadilan dan Layanan Elektronik*

(c) Kemudahan penyelesaian sengketa komersial

1) **Hambatan kepada Keadilan**

Identifikasi persepsi utama terhadap hambatan untuk membawa sengketa komersial ke pengadilan, termasuk **rendahnya kepercayaan terhadap keadilan** dalam proses peradilan, **rendahnya keahlian para hakim**, **lambatnya durasi beracara**, **biaya litigasi yang terlalu tinggi**, dan lainnya.

2) **Waktu dan Biaya untuk menyelesaikan sengketa Komersial**

memberikan perkiraan spesifik untuk berbagai bagian beracara ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk pergi ke pengadilan. Indikator waktu akan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk tiga tahap utama. 1) **Persidangan di pengadilan tingkat pertama**, meliputi pengajuan perkara, melayani pengaduan tergugat, mengajukan permohonan tindakan sementara, menyiapkan keterangan ahli, dan memberikan putusan. 2) **Persidangan pada tahap banding**, yang meliputi pengajuan banding, peninjauan kembali, dan penerbitan putusan akhir. 3) **Pelaksanaan putusan** yang meliputi memperoleh salinan putusan akhir, penyitaan harta benda dan penjualannya melalui pelelangan umum

Persaingan Pasar

(a) Kualitas regulasi untuk mempromosikan Persaingan Pasar (Pilar regulasi),

- (a) Kualitas regulasi terkait persaingan usaha
- (b) Kualitas regulasi untuk lelang pada kontrak publik

(b) Kecukupan layanan publik dalam mempromosikan persaingan (Pilar pelayanan publik)

- (a) Kerangka institusional dan kualitas penegakan pada regulasi persaingan Usaha
- (b) Fitur Transparansi dan Transaksional pada platform pengadaan elektronik

(c) Efisiensi dalam implementasi layanan-layanan utama dalam mempromosikan persaingan pasar.

- (a) Implementasi yang efektif dari tinjauan merger yang disederhanakan
- (b) Waktu yang diperlukan untuk memberikan kontrak publik
- (c) Waktu yang diperlukan untuk membayar kontraktor pemerintah
- (d) Dinamika pasar dan perilaku persaingan

Insolvensi Usaha

(a) Kualitas Regulasi pada Prosedur Insolvensi

1. Indeks pemulaian proses Insolvensi
2. Indeks Pengelolaan Aset Debitur
3. Indeks Lingkup prosedur Likuidasi dan Reorganisasi
4. Indeks Partisipasi Kreditur
5. Keahlian administrator Insolvensi
6. Prosedur khusus bagi UMKM

(b) Kualitas Institusional dan Operasional Infrastruktur pada Proses Insolvensi

(1) Spesialisasi Pengadilan Kepailitan atau Hakim Kepailitan

*Pengadilan kepailitan khusus, tersedianya hakim/divisi pada pengadilan niaga yang **didedikasikan khusus** untuk kepailitan dan beroperasi secara penuh.*

(2) Otomasi Pengadilan dan Ketersediaan Informasi Kepada Publik

*akan mengukur apakah pada perkara pailit, dan prosedur terkait dapat **diajukan secara elektronik** melalui platform khusus; jika biaya pengadilan dapat **dibayar secara elektronik**; dan jika perkara **doket online tersedia**. Ini juga akan mengukur apakah sistem online dapat diakses oleh publik dan apakah putusan dan penetapan kepailitan dapat diakses publik*

(3) Interoperability layanan bagi Prosedur Insolvensi

*akan mengukur implementasi **database terintegrasi** yang mengumpulkan informasi tentang debitur, kreditur, berbagai register jaminan, dan instansi terkait yang memiliki peran dalam proses kepailitan.*

(c) Kemudahan untuk menyelesaikan proses Insolvensi Yudisial

Mengukur **waktu dan biaya** untuk menjalankan proses likuidasi dan proses reorganisasi di pengadilan.

Kesimpulan

- Berhentinya EoDB tidak berarti agenda reformasi terkait kemudahan berusaha menjadi berhenti. Akan tetap ada kebutuhan untuk melanjutkan agenda reformasi hukum ekonomi secara terarah dan berkelanjutan.
- Dari berbagai indeks yang ada, kelihatannya indeks GPI yang dikeluarkan oleh Lembaga Multilateral masih akan memainkan peran signifikan apalagi di era krisis berkepanjangan, dimana pandemi disusul oleh perang Rusia-Ukrainia.
- Belajar dari masa lalu, banyak negara mungkin akan mengurangi ketergantungan kepada indeks GPI, namun bagaimanapun juga keberadaan indikator independent eksternal yang teruji secara metodologi akan membuat proses reformasi lebih efektif, efisien dan terarah.
- Rencana WBG untuk menerbitkan indeks BEE sebagai penerus dari EoDB patut diantisipasi sebagai dasar dari strategi pembaruan kebijakan hukum ke depannya.
- Masih ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk meningkatkan daya saing Indonesia ke depannya.

